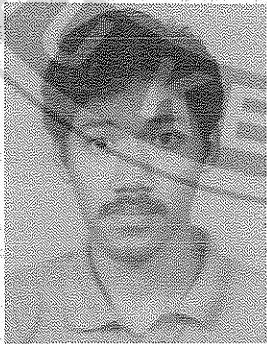


Organisasi Non-Pemerintah dan Masyarakat Sipil

Organisasi Non-Pemerintah (Ornop) di Indonesia, yang berkembang sejak tahun 1970-an, menimba banyak pengalaman dan benturan dalam interaksinya dengan berbagai sektor di masyarakat dan negara Orde Baru. Perumusan mengenai "masyarakat sipil" (civil society) dan posisi Ornop di dalamnya merupakan hasil refleksi Ornop selama ini serta peran yang akan dimainkannya di masa depan. Tulisan ini merupakan suatu sumbangan reflektif sekaligus mencoba menjelaskan kecenderungan format politik baru Ornop.

Bonnie Setiawan

Peneliti



Bonnie Setiawan, lahir di Yogyakarta, Desember 1961. Lulus dari Jurusan Ilmu Politik (1988) FISIP-UI. Pernah bekerja di beberapa Ornop, yaitu Sekretariat Bina Desa, ISJ (Institut Sosial Jakarta), LINK (Lembaga Informasi dan Kajian Kemasyarakatan), dan Indeco (Integrated Development Consultant).

Saat ini merupakan tahap paling baik dan menarik untuk melihat kembali apa yang telah, sedang dan akan terjadi dalam tubuh Ornop (Organisasi Non-Pemerintah)/NGO (Non-Government Organization) di Indonesia. Sejak tahun 1970-an hingga kini, para aktivis Ornop telah mendapat banyak pengalaman yang berharga. Bentuk semula Ornop developmentalis yang kebanyakan didirikan oleh elite kelas menengah Orde Baru, kini berkembang ke arah Ornop yang bercirikan perjuangan demokrasi dan penguatan masyarakat sipil.

Terlihat, dalam kurun waktu 30 tahun, Ornop banyak belajar dari kritik yang dilancarkan kalangan mahasiswa dan internal Ornop sendiri. Gelombang gerakan mahasiswa yang tidak berbasis kampus, serta masuknya generasi kedua dan ketiga aktivis Ornop yang condong pada perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia, tampak memberi warna lain pada Ornop yang sejak semula menjadi ajang tarik-menarik di kalangan politisi lama, intelektual bebas dan aktivis muda. Formasi sosial politik Orde Baru, yang memunculkan berbagai kecenderungan politik baru, turut pula memberi ciri khusus Ornop di Indonesia.

Ornop Tahun 1970-an

Kebanyakan Ornop yang berdiri awal 1970-an merupakan bagian dari diskursus kritik terhadap developmentalisme dan pemerintah Orde Baru. Beberapa di antara mereka adalah, Bina Swadaya yang didirikan oleh Bambang Ismawan dan kawan-kawan pada 1967; LBH (Lembaga Bantuan Hukum, 1970) oleh Adnan Buyung Nasution dan kawan-kawan; LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1971) oleh Nono Anwar Makarim, Ismid Hadad, dan lain-lain; YLK (Yayasan Lembaga Konsumen, 1973) oleh Permadi dan kawan-kawan; YIS (Yayasan Indonesia Sejahtera, 1974) oleh Lukas Hendrata dan Soetrisno KH; Sekretariat Bina Desa (1975) oleh Bambang Ismawan, George J. Aditjondro dan lain-lain; LSP (Lembaga Studi Pembangunan, 1976) oleh Adi Sasono dan kawan-kawan; WALHI (1980) oleh Emil Salim, Erna Witoelar dan lain-lain. Kesemuanya mencerminkan satu generasi awal kalangan aktivis Ornop pasca Orde Lama, yang banyak di antaranya justeru ikut melahirkan Orde Baru.¹

Aktivis yang tergabung dalam komunitas Ornop masa ini tumbuh karena formasi politik Orde Baru era 1970-an. Ilusi akan perubahan dan perbaikan sistem mulai berubah menjadi sikap kritis terhadap kecenderungan penyimpangan.² Mahasiswa mulai melancarkan kritik lewat berbagai gerakan yang dilakukan seperti Gerakan Mahasiswa Menggugat, Gerakan Golput, Gerakan Anti Korupsi, dan Gerakan Anti Taman Mini sekitar 1970-1972. Kritik yang dilakukan para mahasiswa kemudian berujung pada protes terhadap strategi pembangunan Orde Baru. Protes tersebut, lewat kedatangan PM Jepang Kakuei

Tanaka pada 1974, tanpa dinyana meletus menjadi sebuah *riot*. Peristiwa Malari, seperti disebut pemerintah, dapat dikatakan merupakan awal putusnya hubungan antara pemerintah Orde Baru dengan pendukung intelektualnya.³ Untuk sesaat beberapa intelektual dan mahasiswa dijebloskan ke dalam penjara.

Arah baru bagi kegiatan alternatif kemudian dimulai, salah satunya melalui Ornop. Di sisi lain, gerakan mahasiswa 1978 turut memberi arah bagi tumbuhnya aktivis Ornop. Menjelang Sidang Umum 1978 berlangsung aksi-aksi mahasiswa di beberapa kampus yang pada gilirannya mendorong pemerintah menangkap dan mengadili para aktivisnya. Beberapa di antaranya, seperti Indro Tjahjono, Heri Akhmadi, Roem Topatimasang, almarhum Djodi Wurjantoro dan lain-lain, kemudian muncul sebagai generasi kedua aktivis Ornop.

Tentang Istilah

Apa yang terjadi selama tahun 1970-an merupakan awal perkembangan Ornop sebagaimana yang sekarang dikenal. Perlu dipahami, istilah Ornop masa itu digunakan sebagai terjemahan dari NGO dalam lingkungan internasional. Sedangkan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) mulai digunakan sebagai istilah dalam sebuah seminar Ornop di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada 1980 — atas inisiatif Bina Desa, WALHI, dan YTKI. Alasan utama memakai nama LSM karena kekhawatiran terhadap istilah Ornop yang mengandung arti "berlawanan dari pemerintah" atau oposan pemerintah.⁴ Di

3. Lihat, Arief Budiman, "Gerakan Mahasiswa Menggugat dan Teknokrat," dalam *Politika*, No. 3, Th. III, 1987, hal. 6.

4. Lihat laporan Seminar Peranan LSM/LPSM Dalam Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat, Jakarta, 5-7 Oktober 1981, terutama makalah Erna Witoelar, "Identitas dan Kemandirian Ornop," hal. 20; dan Sarino Mangunpranoto, "Hubungan Antara LPSM/Ornop dengan Masyarakat, LPSM/Ornop Lain, Pemerintah dan Lembaga Pemberi Bantuan," hal. 56-58. Dalam lokakarya "Kerjasama Terpadu untuk Pengembangan Pedesaan" yang diadakan Bina Desa, 13-15 April 1978, di Ungaran dipakai istilah LPSM (Lembaga Pembina Swadaya Masyarakat) yang sifatnya terbatas pada lembaga/organisasi yang secara langsung bergerak membina pengembangan masyarakat, lihat makalah Bambang Ismawan, "Identitas

1. Lihat, misalnya, Paul Moedikdo, "Strategi LBH Dalam Konteks Politik Indonesia," dalam *RAJAR*, No. 35, 1989, hal. 58; Abdul Hakim G. Nusantara, "Pengalaman Advokasi Hak-Hak Asasi Manusia: Tantangan dan Prospek," dalam Seminar Refleksi, Pengalaman LSM dan Agenda Dasawarsa 1990-an, Kumpulan Makalah, diselenggarakan atas kerjasama 10 LSM, di gedung PKBI, Jakarta, 1-2 September 1994, hal. 4; Wawancara dengan Adi Sasono dalam *Politika*, No. 3, Th. III, 1987, hal. 8.

2. Lihat, dokumentasi Soe Hok Gie, *Zaman Peralihan*, penyunting. Stanley dan Aris Santoso (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1995).

tengah-tengah kecenderungan eufemisme politik dan sensor-diri, kalangan Ornop juga berusaha melunakkan arti keberadaan mereka, khususnya bila berhadapan langsung dengan pemerintah. Agar dapat bekerja sama seluas-luasnya dengan pemerintah, mereka memposisikan diri sebagai "bagian dari sistem." Karena itu segala macam hambatan yang dapat mengganggu sedapat mungkin dihindari.⁵

Sudah sedemikian banyak kritik yang dilontarkan terhadap istilah LSM. Keberatan pokok terhadap istilah LSM karena istilah ini dirumuskan dari rasa khawatir atau *self-censorship*; penggunaannya mengandung arti teknokratis yang merujuk hubungan LPSM-LSM atau LSM-KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat); mengandung arti adanya prasyarat pelembagaan terlebih dahulu dalam bentuk legal-formal; kata "swadaya" tidak cocok dengan realitas karena kebanyakan Ornop sesungguhnya tergantung bantuan dana dari luar; secara keseluruhan mempunyai arti paradigmatik sebagai bagian dari develop-

mentalisme; mengandung arti partikularistik yang sebenarnya tidak tepat sebagai terjemahan NGO (serupa dengan, misalnya, *Trade Union* yang diterjemahkan sebagai Serikat Buruh dan bukan semacam "paguyuban" atau "kerukunan buruh"); dan LSM mengandung arti terbatas bersifat *micro-level*.

Sementara itu istilah Ornop tampak lebih mengena karena merupakan terjemahan paling tepat dari NGO; berada dalam paradigma alternatif; mengandung arti independen dan tidak terkooptasi; tidak legal-formal tetapi terorganisasi; mengandung arti penguatan "masyarakat sipil," dan NGO atau Ornop adalah suatu entitas tertentu yang bersifat universal (global) dan mempunyai karakteristik khusus. Karena itu pemakaian Ornop dalam tulisan ini adalah dalam pengertian LSM pada masa itu dan penggunaannya sekarang.

Ada kritik bahwa pengertian Ornop terlalu luas karena mencakup sektor swasta (bisnis) dan organisasi kemasyarakatan lain yang tentunya juga bersifat nonpemerintah.⁶ Namun istilah Ornop (dan NGO) sudah dengan sendirinya menunjukkan identitas yang berbeda. Dia dibentuk oleh sejarah pada 1950-1960 hingga sekarang sehingga agak sulit untuk menyamakannya dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) lain, organisasi sosial/karitatif (orsos), organisasi bisnis/swasta, ataupun organisasi keagamaan. Dengan demikian tidak tepat untuk menyatakan, misalnya, Budi Utomo atau Taman Siswa atau pesantren sebagai Ornop, karena tradisi, sejarah, dan identitasnya yang berbeda.

Pengertian lain tentang Ornop adalah sebagai PVO (*Private Voluntary Organization*). Konsep ini berasal dari konteks Amerika dan digunakan oleh USAID serta Bank Dunia untuk melihat peran yang dimainkannya. Tetapi perbedaan antara NGO dengan PVO bukanlah

5. Ismid Hadad, dalam kesimpulannya menunjukkan, "sesungguhnya LPSM tak lain dari bagian gerakan partisipasi rakyat untuk menunjang dan mensukseskan pembangunan nasional," *ibid*, hal. 24. Dalam perkembangannya beberapa Ornop besar melakukan kerjasama yang luas dengan pemerintah, seperti tergabung dalam "Kelompok Kerja Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan di Daerah" (PPMP) yang tertuang di dalam S.K Mendagri No. 45/1986. Kerjasama lainnya dalam "Forum Komunikasi/Konsultansi Antara Pemerintah dengan LSM dan NGO di Indonesia" yang diprakarsai oleh Ditjen Sospol Depdagri tahun 1993.

6. Richard Holloway, misalnya, menganggap istilah NGO terlalu luas dan artinya bisa juga berlaku bagi organisasi lain yang bukan bagian dari pemerintah. Demikian pula sub-kategorisasinya mengenai NGO yang sangat teknis. Meskipun demikian Holloway benar untuk mengatakan bahwa NGO adalah salah satu bagian dari *civil society*, lihat Richard Holloway, "Organization of Civil Society: Bangladesh," dalam Isagani R. Serrano, *Civil Society in The Asia Pacific Region* (USA: CIVICUS, 1994), hal. 137-143.

sekedar istilah, melainkan lebih substansial. Rajesh Tandon mengulas hal ini dengan baik. Dia menyebut PVO sebagai bagian teori "Tiga Sektor," yaitu pemerintah, bisnis atau korporasi, dan organisasi *voluntary* (kerelawanan) yang saling memperkuat dan komplementer. PVO, yang masuk dalam sektor ketiga, jauh berbeda dengan rumusan NGO/Ornop yang merupakan bagian dari teori masyarakat sipil. Menurut Tandon, "NGO/Ornop perlu dilihat sebagai sebuah institusi publik yang terlibat dalam proses penguatan masyarakat sipil dalam berhadapan dengan negara dan elite penguasa. Konseptualisasi ini dengan sendirinya menantang kecenderungan yang tumbuh belakangan untuk menyamakan 'voluntary development NGOs' dengan sektor swasta (Bank Dunia, Reagan-Bush-Thatcherisme) yang melihat NGO sebagai bagian dari sektor swasta). Konsep ini mempertanyakan label Amerika terhadap NGO sebagai PVO."⁷ NGO/Ornop jelas merupakan istilah yang lebih baik dan memadai ketimbang LPSM-LSM atau PVO.

NGO, sebagai istilah, digunakan pertama kali dalam dunia internasional oleh PBB pada 1953 yang mengacu organisasi nonnegara yang terkait dengan badan-badan PBB.⁸ NGO sendiri merupakan institusi baru di dunia Barat yang muncul sekitar tahun 1950-1960. Pada awalnya NGO hanya mengurus bantuan kedermawanan (*charity*). NGO di Barat juga banyak yang lahir akibat keprihatinan terhadap pembangunan kembali Eropa pasca Perang Dunia II, bantuan Marshall Plan dari Amerika kepada Eropa Barat, serta bantuan solidaritas internasional untuk Dunia Ketiga yang baru merdeka. Bantuan pembangunan kepada NGO pada tahun 1970-an ke atas lahir bersamaan dengan mengalimya bantuan asing (dan utang) seiring dengan dekade "modernisasi" dan pertumbuhan ekonomi negara Dunia Ketiga. Di samping itu, ada

pula NGO yang berdiri sejak awal abad ke-20 yang berasal dari tradisi Kristen/Katolik.

NGO di Barat secara umum dapat dibedakan dalam dua jenis. *Pertama*, NGO yang berorientasi pada aksi/program. *Kedua*, NGO yang berfungsi sebagai lembaga donor. Jenis yang pertama menjalankan programnya karena keprihatinan terhadap berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti isu hak asasi manusia, lingkungan hidup, perdamaian, keadilan, dan lain-lain. Beberapa di antaranya adalah IPPF (*International Planned Parenthood Federation*) yang berdiri di Inggris pada 1952; ICJ (*International Commission of Jurists*, 1952) didirikan di Swiss; IOCU (*International Organization of Consumers Union*, 1960), didirikan di Belanda; *Amnesty International* (1961), NGO yang membela hak-hak asasi tahanan politik di seluruh dunia, didirikan di Inggris; ICVA (*International Council of Voluntary Agencies*, 1962) didirikan di Swiss; *Minority Rights Group* (1969), NGO pembela masyarakat adat, didirikan di Inggris; *Green Peace* (1971), organisasi terkemuka lingkungan hidup, didirikan di Inggris; WRM (*World Rainforest Movement*, 1986), aktif membela pelestarian hutan tropis dan berdiri di Malaysia.

Sementara NGO jenis kedua yang berfungsi sebagai lembaga donor adalah NGO yang khusus menyalurkan bantuan dana kepada NGO di Dunia Ketiga. Mereka ini menghimpun dana dari usaha-usaha swadaya masyarakat, donatur perorangan, usaha komersial, maupun dari alokasi dana bantuan kerja sama pembangunan internasional pemerintah yang kemudian disalurkan ke NGO bersangkutan. Beberapa di antara mereka yang terkemuka adalah OXFAM yang berdiri di Inggris pada 1942, NOVIB dan HIVOS yang berdiri di Belanda pada 1956 dan 1968, CIDA yang berdiri di Kanada pada 1968, dan lain-lain.

NGO kemudian menjadi organisasi/lembaga yang diakui pengaruhnya di tingkat nasional, regional maupun internasional. Beberapa di antaranya bahkan mendapat penghargaan Nobel untuk Perdamaian karena sumbangan mereka yang signifikan terhadap kemanusiaan, keadilan dan perdamaian dunia. Misalnya, Sean MacBride, ketua

7. Rajesh Tandon, "Civil Society: The State and The Role of NGOs," dalam Serrano, *op.cit.*, hal. 118-121. Untuk tulisan yang menggunakan PVO dalam keberadaan Ornop di Indonesia, lihat Geoffrey B. Hainsworth, "Private Voluntary Organizations and Socio Economic Security and Equality in Indonesia," *Prisma The Indonesian Indicator*, No. 28, June 1983, hal. 61.

8. Serrano, *op.cit.*, hal. 36.

Amnesty International tahun 1961-1974, mendapat Nobel tahun 1974; Mairead Corrigan dan Betty Williams (1976), aktivis perdamaian Irlandia pendiri *Community of Peace People*, *Amnesty International* (1977), sebagai lembaga hak asasi manusia; Adolfo Perez Esquivel (1980), aktivis hak asasi manusia dari Argentina yang mendirikan *Service for Peace and Justice*, *International Physician for the Prevention of Nuclear War* (IPPNW, 1985) didirikan oleh Bernard Lown (USA) dan Yevgeny Chazov (USSR); dan Rigoberta Menchu (1992), aktivis hak-hak masyarakat adat dari Guatemala. Dengan prestasi demikian, NGO tidak bisa lagi dikesampingkan dalam setiap isu sosial-politik. NGO merupakan representasi kekuatan masyarakat.⁹

Ornop Tahun 1980-an

Akibat dari semakin jelasnya identitas Ornop, meluasnya berbagai pertemuan dan forum Ornop yang diselenggarakan LBH, Bina Desa, WALHI maupun jaringan Ornop; serta penyebaran kegiatan lembaga donor di daerah; maka mulai tumbuh Ornop-Ornop di daerah pada masa 1980-an. Contohnya, YKMKB (Yayasan Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat) di Pontianak yang berdiri tahun 1984; WIM (Wahana Informasi Masyarakat) di Sumatera Utara (1985); KSPPM (Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat) di Siborong-borong, Sumatera Utara (1985); YPMD-IRJA (Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya) di Irian Jaya (1985); YAO (Yayasan Alfa Omega) di Kupang, NTT (1985).

Ornop memasuki periode tempat berbagai identitas, bentuk dan pandangan bertemu selama tahun 1980-an. Pada periode ini terbentuk berbagai jaringan yang berasal dari inisiatif beberapa Ornop yang bertujuan untuk saling memperkuat dan bekerjasama dalam bidang tertentu. Misalnya, WALHI yang berasal dari kelompok Sepuluh dan terbentuk tahun 1980, SKEPHI (Sekretariat Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia, 1982), KRAPP

(Kelompok Relawan Anti Penyalahgunaan Pestisida, 1982), SKREPP (Sekretariat Kerjasama Relawan Penanggulangan Pencemaran, 1982), JARI (Jaringan Action Research Indonesia, 1983), dan P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1983).¹⁰

Periode ini ditandai pula oleh semakin menguat dan membesarnya dukungan dana kepada beberapa Ornop besar. Kecenderungan monopoli dana yang dilakukan Ornop-Ornop tersebut jelas membuat khawatir dan cemburu Ornop lainnya. Situasi demikian tentunya menciptakan kemapanan dan *status-quo* seperti yang ditunjukkan oleh "13 LSM besar" saat itu yang cenderung menjadi "kartel" Ornop. Dalam arti sebenarnya "kartel" ini mempunyai akses, kekuatan dana, *lobbying*, dan fasilitas yang digunakan untuk memperbesar kelembagaan Ornop bersangkutan.¹¹ Kartel Ornop besar, mayoritas terdiri dari Ornop generasi pertama, cenderung tidak dapat membebaskan diri dari *establishment* dan "developmentalis." Mereka tidak mampu lagi mengkritik sistem sosial-politik secara efektif. Mereka pun tidak mampu membuat terobosan berarti terhadap perubahan. Tokoh-tokoh figurinya sendiri masih banyak terjerat aliran politik lama yang membuat sulit untuk saling berdekatan satu dengan lainnya.¹²

10. Lihat tema "LSM Jaringan Tidak Sama dengan LSM Payung," dalam Buletin *BINA DESA* No. 59, Th. XII, Juni 1987.

11. Ke-13 LSM besar tersebut adalah: YLBHI, Bina Desa, Bina Swadaya, LP3ES, LSP, YIS, BK3, YLK, WALHI, DIAN DESA, P3M, PKBI, dan YPMD. Kelompok 13 LSM Besar berawal dari prakarsa MAF-CIDA pada bulan Juni 1986 yang mengundang ke-13 LSM tersebut guna mendiskusikan kerjasama LSM Kanada-Indonesia; lihat "Catatan Khusus Sekitar Lokakarya LSM/LPSM Indonesia-Kanada," dalam Buletin *BINA DESA*, No. 67, Th. XIV, Oktober 1988, hal. 33-34.

12. M.M. Billah melihat "...dalam beberapa hal, masih terasa pengaruh pengelompokan primordial pada LSM yang menggunakan simbol non-primordial. Setidaknya belum hilang sama sekali. Tidak benar LSM dan LPSM saat ini dalam perilakunya sama sekali tidak memberi pengaruh-pengaruh primordial. Cuma kadang-kadang malu mengakui," dalam "Dari Semangat Kebangsaan ke Perubahan Struktural," Buletin *BINA DESA*, No. 60, Th. XIII, Agustus 1987, hal. 5.

9. Data NGO Barat diambil dari Tyler Wasson (ed.), *Nobel Prize Winners* (New York: The New Wilson Company, 1987); Karin E. Koek (ed.), *Encyclopedia of Association: International Organization*, Part I (Michigan: Gale Research Inc., 1989, 23rd edition).

Pada pertengahan 1980-an pemerintah hendak mengundangkan UU Keormasan. Rancangan undang-undang ini merupakan salah satu paket "Perundang-undangan Pembangunan Kehidupan Politik" yang diajukan Mendagri Soepardjo Rustam pada 23 Juni 1984.¹³ Kalangan Omop, yang termasuk akan diatur dalam UU Keormasan tersebut, memberi berbagai tanggapan sebagai wujud kekhawatiran mereka. Umumnya kekhawatiran yang dilontarkan berupa hambatan administratif yang sangat besar, termasuk pengurusan yang birokratis, jika pengawasan dilaksanakan secara tuntas oleh pemerintah. Besarnya peluang campur tangan pemerintah dalam penentuan prioritas kerja Ornop, karena segala sesuatunya harus sepengetahuan pemerintah, dan besarnya ancaman pembubaran Ornop karena kehidupannya ditentukan oleh izin dan pengakuan pemerintah, menjadikan ruang gerak Ornop semakin sempit. Terlebih lagi bantuan yang selama ini diterima dari lembaga donor asing harus seizin pemerintah.¹⁴ Akibatnya, timbul tarik-menarik interpretasi serta keresahan tidak berkeputusan di kalangan Ornop. Pemerintah akhirnya mengakui UU Keormasan tidaklah mencakup Ornop karena adanya perbedaan mendasar antara Organisasi Kemasyarakatan dengan Ornop.¹⁵

Di sisi lain, gerakan mahasiswa awal 1980-an mengalami masa pembatasan yang cukup ketat. Tahun 1982 merupakan akhir

keberadaan Dewan Mahasiswa (*student government*) yang ditandai oleh aksi-aksi kecil menyusul kebijakan depolitisasi kampus lewat NKK/BKK pada 1979 dan kebijakan transpolitikasi kampus tahun 1983. Pada 1982, Arief Budiman kembali ke Indonesia dan mempopulerkan teori Neo-Marxis dan jalan ke "sosialisme." Demikian pula tulisan-tulisan Adi Sasono, Sritua Arief, Dawam Rahardjo, dan Farchan Bulkin yang membawa mahasiswa kepada teori-teori radikal.¹⁶ Pengalaman dan pemahaman-pemahaman "baru" menyebabkan tumbuh suburnya kelompok-kelompok studi (mahasiswa) di luar kampus. Mereka ini mempunyai minat akan kajian alternatif dan mencoba menjawab perubahan struktural apa yang diinginkan. Aktivistik kelompok studi kemudian menjadi generasi ketiga Ornop yang aktif saat ini.

Menjelang akhir 1980-an dimulai gelombang baru gerakan mahasiswa yang tidak berbasis kampus. Mereka melakukan aksi jalanan yang kebanyakan membela kasus-kasus tanah. Mereka inilah generasi baru mahasiswa militan yang merupakan antitesa dari tidak dibolehkannya gerakan Dewan Mahasiswa yang berbasis kampus. Ciri umum gerakan mahasiswa ini adalah aktif di luar kampus dan memperjuangkan kasus struktural rakyat. Cara yang dilakukan terutama dengan aksi turun ke jalan memprotes dan melakukan kampanye kasus-kasus yang konkret. Sifatnya pun lintas kampus, terdiri dari aktivis berbagai kampus di berbagai daerah, dengan pimpinan yang selalu berganti. Walaupun militan, radikal, dan cenderung anarkhis, gerakan mahasiswa periode ini tetap menolak penokohan individu di antara mereka. Secara fenomenal mereka muncul pertamakali pada 1989 ketika membela petani Badega dalam konflik dengan PT SAM

13. Rancangan Undang-undang yang ketika itu diajukan adalah RUU Perubahan UU Pemilihan Umum; Perubahan UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD; Perubahan UU Partai Politik dan Golongan Karya; UU Referendum; dan UU Organisasi Kemasyarakatan; lihat, YLBHI, *Pokok-Pokok Pemikiran Yayasan LBH Indonesia Tentang Perundang-Undangan Pembangunan Kehidupan Politik* (Jakarta: YLBHI, Agustus 1984).

14. Abdurrahman Wahid, "Prospek LSM Setelah UU Organisasi Kemasyarakatan Nanti," *Kompas*, 5 Januari 1985.

15. "LSM Itu Bukan Musuh ...," *Minggu Media Indonesia*, 19 Maret 1995, No. 5355, Th. XXVI. Menurut Rudini, "LSM itu bentuk organisasinya tidak sama. Kalau organisasi itu *kan* jelas, perkumpulan orang seprofesi, mesti punya anggaran dasar, sudah ditentukan azasnya, rumah tangganya. LSM itu bisa insidental, kalau ada kegiatan yang bisa dikerjakan bersama. Yang penting ada kelompok yang berinisiatif. Jadi LSM itu bukan Ormas."

16. Lihat, Adi Sasono, "Indonesia, Dari Ekonomi Terpimpin ke Kapitalisme Terpimpin," dalam *Prisma*, No. 1, Januari 1982; Sritua Arief, "Teori Ekonomi dan Kolonialisme Ekonomi," dalam *Prisma*, No. 1, Januari 1982; M. Dawam Rahardjo, "Kritik Terhadap Marxisme dan Marxisme Sebagai Kritik Terhadap Pembangunan Kapitalis," dalam *Prisma*, No. 1, Januari 1982; Farchan Bulkin, "Kapitalisme, Golongan Menengah dan Negara: Sebuah Catatan Penelitian," dalam *Prisma*, No. 2, Februari 1982.

menyangkut perampasan tanah.¹⁷ Generasi mahasiswa ini menjadi bagian dari aktivis Ornop generasi keempat.

Dinamika internal Ornop pertengahan 1980-an, meskipun masih tidak jelas, mencerminkan ketidakpuasan terhadap "The Big NGOs" (BINGOs). Hasilnya adalah beberapa cetusan pemikiran yang mencoba mengoreksi keadaan.¹⁸ Di samping itu, dengan semakin menguatnya jaringan Ornop dalam berbagai cara dan bentuk, ide-ide baru mulai bermunculan di banyak daerah yang memperkuat komunikasi dan *brainstorming* yang efektif. Aktivis yang semakin banyak jumlahnya dan lebih *advance* mulai mengelilingi Indonesia melakukan pelatihan, forum, tukar gagasan, dan perlahan-lahan mengembangkan identitas Ornop yang sama.¹⁹ Ornop di daerah, karena kondisi sosial-ekonomi-politiknya yang terbatas dan terbelakang, mulai mendapat masukan dan ide baru yang dengan sendirinya mengarah kepada perubahan. Di sisi lain, aksi-aksi turun ke jalan yang dilakukan mahasiswa-mahasiswa di luar Jawa dan menyebabkan radikalisasi gerakan mahasiswa, turut mendorong Ornop untuk mengikuti kritik mereka.

Dalam hal ini perhatian khusus perlu diberikan kepada SKEPHI yang telah meradikalisasi Ornop dan membuat tantangan efektif bagi model-model Ornop. Meskipun cara yang ditempuh terkadang kurang tepat, SKEPHI telah menghidupkan kembali daya juang yang seharusnya ada di dalam Ornop, khususnya untuk bergandengan dengan sektor gerakan mahasiswa, gerakan lingkungan hidup, dan gerakan petani. SKEPHI mampu menandingi paradigma Ornop mapan

17. Lihat *Suara Kami*, Media Untuk Keadilan, No. 1/Februari, 1989.

18. Muncul ke permukaan lewat "Pernyataan Keprihatinan" dan dibubuhi puluhan tanda tangan aktivis Ornop, hasil dari pertemuan di Bukittinggi (1987) dan Baturaden (1990).

19. Banyak aktivis bekerja di beberapa Ornop kemudian menjadi aktivis perorangan yang membidani berdirinya Ornop atau jaringan Ornop di daerah. Mereka, yang secara bergurau disebut NGI (*Non-Government Individual*), di antaranya adalah almarhum Erwin Panjaitan, aktivis dari Sumatera Utara yang banyak mendorong perkembangan Ornop di Indonesia Timur.

yang dianggap sebagai patron orientasi gerakan Ornop, serta membelokkan pada orientasi gerakan Ornop yang terikat pada perjuangan demokrasi.²⁰ Sintesa yang terjadi menyebabkan tumbuhnya pandangan baru akan peran Ornop yang terlihat dari, misalnya, perkembangan pemikiran dan kegiatan aktivis Ornop generasi pertama.²¹ Keadaan demikian memberikan manfaat, sehingga Ornop mulai berpikir akan kesamaan pandangan dasar dan tujuan perjuangan. Dengan demikian tumbuh homogenisasi, hal yang semula dilihat secara pesimis. Nampaknya pandangan ini juga lahir karena keadaan obyektif perjuangan demokrasi dan hak asasi manusia yang menjadi tujuan semua gerakan pembaruan di dunia.

Bila diperhatikan secara jeli, maka dapat dilihat pertalian yang erat antara Ornop dan gerakan mahasiswa. Dikotomi yang coba dipertajam oleh gerakan mahasiswa tentang perbedaan antara Ornop dengan mahasiswa dan kelompok studi sebenarnya tidak mempunyai landasan historis. Gerakan mahasiswa merupakan "pemasok" sumber daya manusia bagi Ornop yang berlaku dimanapun. Ornop maupun gerakan mahasiswa merupakan satu kategori dari gerakan intelektual kelas menengah yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Mereka merupakan sebuah lapisan (kelas menengah) dalam formasi sosial Orde Baru yang semakin bertambah jumlahnya dan semakin merasa kesulitan mengembangkan aspirasi sesuai dengan perkembangan zaman. Hampir tidak ada perubahan

20. "Sokongan keuangan yang besar, yang terus menerus mendemoralisasi aktivis-aktivis sosial (bahkan mahasiswa) yang diserap ke dalamnya... LSM justru menciptakan stratifikasi di antara mereka sendiri — terbentuknya gejala BINGO dan LINGO, Kelompok 13 dan INGI merupakan gejala konsentrasi BINGO yang mempersulit transformasi LSM untuk meneliti agenda politik dan melakukan reorganisasi," lihat Indro Tjahjono, "Gerakan Mahasiswa Indonesia: Sebuah Perjalanan Historis," dalam *Lentera*, No. 1, Th. 1, Agustus 1990.

21. Lihat tulisan reflektif George J. Adijondro, "Hutang, Hutan, Huru-Hara dan Hura-Hura: Suatu Kritik Terhadap Strategi Advokasi Lingkungan Yang Terlalu Bertumpu Pada Diplomasi Hutang Luar Negeri," dalam Buletin *Bina Darma*, No. 40, Maret 1993, hal. 33-48; M.M. Billah, "Ornop dan gerakan Pro-Demokrasi Dalam Ideologi Pembangunanisme (Satu Catatan Kecil)," *PERAN*, 1995.

mendasar yang dilakukan oleh Orde Baru selama 30 tahun berkuasa. Hal demikian menimbulkan ketidakpuasan, khususnya, di kalangan kelas menengah baru yang mempunyai harapan dan aspirasi sesuai dengan tuntutan kontemporer.

Selama ini berlangsung situasi politik yang agak ganjil di Indonesia. Para aktivis sosial tidak punya saluran yang tepat, kecuali ke Ornop. Aktivis yang sudah tidak menjadi mahasiswa dengan mudah memilih memasuki Ornop. Partai politik, Ormas, kelompok kepentingan, atau parlemen masih dianggap kurang menarik. Demikian pula pers, bisnis atau wadah profesi lain yang tidak bisa memberi kesempatan. Dengan demikian Ornop di Indonesia menjadi sektor yang jauh lebih penting daripada institusi lain yang lebih tua karena secara leluasa mampu menampung visi dan aspirasi mereka dalam memperjuangkan demokrasi dan nilai-nilai kerakyatan. Ornop memberi tempat kepada mereka untuk tetap hidup di tengah kondisi ekonomi rakyat yang masih buruk; serta memberi keleluasaan, kreativitas, dan kemampuan mengadakan perubahan sebagaimana yang diidamkan.

Demikian pula Ornop-Ornop di daerah menjadi kuat terutama karena masuknya mantan aktivis mahasiswa dari universitas-universitas daerah. Generasi "terpelajar" yang mengalir setiap tahun menyadari betapa sulitnya mencari pekerjaan yang sesuai apalagi sebanding dengan idealisme yang tetap dipelihara. Mereka kemudian menemukan tempat yang cocok di Ornop masing-masing daerah. Keterbelakangan regional tampaknya juga menyebabkan keprihatinan dan kegalauan yang tak terselesaikan. Masalah hutan, tanah adat, budaya adat, kemiskinan dan keterbelakangan, sumber daya lokal yang terkuras, dominasi pusat, investasi pemodal kuat, aparat yang menyalahgunakan kekuasaan, dan lain-lain sesungguhnya merupakan masalah klasik yang terus berdatangan dan sulit diharapkan penyelesaiannya. Dengan demikian Ornop di berbagai daerah harus siap menghadapi tantangan yang cukup kompleks.

Ornop Tahun 1990-an

Gerakan mahasiswa kembali bangkit menjelang tahun 1990-an. Mereka pun masih

tetap mengkritik Ornop. Sebagai sebuah gerakan, mereka memulai dengan militansi dan radikalisme yang tinggi serta berupaya menggoyahkan kelumpuhan gerakan demokrasi. Aksi-aksi yang dijalankan di lapangan sebagian besar menyinggung masalah pertanahan dan perburuhan dengan memakai bentuk komite nonpermanen. Beberapa kasus tanah yang ditangani di antaranya adalah Badega, Cimacan, Kedung Ombo, Rancamaya, Gili Terawang, dll.²² Model penanganan kasus menyebabkan terjadinya interaksi antara mereka dengan aktivis Ornop, meskipun sejak semula berjalan tersendat karena sikap yang anti gerakan Ornop. Namun belakangan sikap demikian mulai mencair karena kebutuhan mereka akan dukungan Ornop yang sesungguhnya mempunyai keahlian dalam bidangnya dan kenyataan aktivis Ornop yang kebanyakan mantan aktivis mahasiswa. Aliansi Ornop-mahasiswa lewat SKEPHI, LBH, Pijar, dan lain-lain kemudian dimulai.

Semakin disadari bahwa sektor mahasiswa maupun Ornop saling membutuhkan, khususnya dalam bergandengan dengan sektor buruh, tani dan lain-lain dalam membangun gerakan demokrasi. Adnan Buyung Nasution dalam hal ini menyatakan, "pada tahun-tahun terakhir ini tumbuh kelompok-kelompok baru, LSM, mahasiswa aktivis di dalam dan di luar kampus, yang berjuang untuk petani, buruh, lingkungan hidup dan lain-lain. Ini semua merupakan embrio tumbuhnya kekuatan-kekuatan rakyat baru yang akan membawa panji-panji demokrasi di tanah air."²³ Militansi gerakan mahasiswa juga semakin tinggi setelah penangkapan dan diadilinya para aktivis kelompok studi dan gerakan mahasiswa.²⁴

22. Lihat "Monitor Hak-Hak Asasi Manusia," Buletin yang diterbitkan oleh *INSAN* dan *LPHAM* sejak tahun 1989 yang banyak mencatat kejadian tersebut.

23. Adnan Buyung Nasution, "Mengintensifkan Gerakan Demokratisasi: Refleksi dan Proyeksi Pengalaman LBH," dalam Seminar Refleksi Pengalaman Dua Dasawarsa LSM dan Agenda Dasawarsa 1990-an, Jakarta, 1-2 September 1994, hal. 11.

24. Misalnya, penahanan terhadap Bambang Isti Nugroho, Bambang Subono dan Bonar Tigor Naipospos karena tuduhan mengedarkan buku terlarang; penahanan

Penangkapan, dengan anggapan membuat mereka jera, malahan membuat mahasiswa lebih militan daripada sebelumnya.

SKEPHI yang berkoalisi dengan gerakan mahasiswa berhasil memberi model lain terhadap gerakan Ornop. Aksi-aksi radikal-militan yang dilancarkan sangat menarik perhatian masyarakat. Begitu pula oposisi yang dilakukan SKEPHI terhadap INGI (dan LBH) boleh dikata merupakan bagian dari identitas alternatif yang hendak ditawarkan.²⁵ Tetapi SKEPHI berkembang menjadi "radikal-anarkis" terutama lewat kehadiran INFIGHT yang didinakan untuk "menyaingi" koalisi INGI. SKEPHI kemudian menjadi kendor karena krisis internal di dalam, meskipun kini masih aktif dalam advokasi lingkungan hidup dan lebih bersifat *low-profile*. Namun, secara umum, SKEPHI telah memberi sumbangan berarti dalam diskursus Ornop.

Koalisi Ornop yang cukup berpengaruh adalah INGI (berdiri tahun 1985) yang sebenarnya merupakan bagian dari advokasi kritik pembangunan yang dimotori oleh LBH dan NOVIB. Setiap tahun INGI menyelenggarakan konferensi dengan berbagai NGO internasional yang mengupas masalah pembangunan di Indonesia dalam kaitannya dengan IGGI (*Intergovernment Group on Indonesia*).²⁶ Konferensi yang diselenggarakan di berbagai negara donor tersebut,

terhadap 6 mahasiswa ITB akibat aksi di kampus; Beathor Suryadi dan Nuku Sulaeman dari Yayasan Pijar; Dedi Ekadibrata karena kasus pembelaan tanah; 11 mahasiswa dalam aksi di DPR-RI Jakarta (Yenny Damayanti cs); dan lain-lain.

25. Lihat publikasi SKEPHI, seperti *GAUNG* dan *MONITORING HUTAN*.

26. Dokumentasi kegiatan INGI ada dalam "Democratization Through People's Participation," INGI Aide Memories 1985-1992, *INFID Working Paper No. 1*, July 1993. INGI semula merupakan singkatan *Inter-NGO Conference on IGGI matters* yang kemudian di tahun 1988 dirubah menjadi *International NGO Forum on Indonesia* dan kembali berubah di tahun 1993 menjadi *INFID (International NGO Forum on Indonesian Development)* karena dibubarkannya IGGI. Dalam dokumen "INGI and International Development Policies," Daniel S. Lev secara tepat menyebutkan bahwa INGI pada dasarnya merupakan bagian dari perdebatan mengenai "pembangunan," dan posisi INGI berada di dalam kerangka "pembangunan" itu sendiri.

dengan jumlah rombongan delegasi Indonesia yang cukup banyak, selalu dianggap menggelikan oleh kalangan Ornop menengah/kecil/daerah yang tidak pernah merasa terwakili. Meskipun demikian INGI memainkan peran cukup sulit, terutama karena tekanan pemerintah yang melihatnya sebagai "sekelompok oposan" yang berupaya menjelekkan dan membahayakan kredibilitas pemerintah di mata negara donor.²⁷

Namun agak sulit untuk menindak INGI dalam posisinya yang demikian. Secara strategis INGI telah mengaitkan dirinya ke dalam sistem IGGI yang kritiknya sama sekali tidak menyulitkan kedudukan negara donor ataupun bantuan asing (utang). Ketika IGGI dirubah menjadi CGI (*Consultative Group on Indonesia*) pada 1992, — dengan sendirinya menghilangkan pengaruh pemerintah Belanda di dalamnya (yang sudah terpojok karena pemutusan hubungan bantuan Belanda ke Indonesia) dan memperkuat pengaruh Bank Dunia — INGI pun melakukan penyesuaian serupa dengan mengubah wajah menjadi INFID dan mengaitkan dirinya ke dalam sistem CGI yang dipimpin Bank Dunia. Posisi demikian tetap kritis di muka pemerintah dan di lain pihak INFID menempatkan diri pada posisi konservatif baik menyangkut bantuan asing maupun developmentalisme. Dengan perkataan lain, meskipun reformis-konservatif, INFID tetap memainkan posisi progresif di mata pemerintah.²⁸

Selain INFID, koalisi Ornop mapan lain dapat dilihat pada PDF (*Participatory Development Forum*) yang berdiri pada tahun 1986

27. Lihat misalnya, "Pangab Sesalkan LSM Yang Menjelekkan Bangsa Sendiri," *Kompas*, 6 Agustus 1989; "Menhankam Mensinyalir Ada LSM Mengemas Isu Untuk Menekan Negara," *Kompas*, 30 September 1994; "Pangdam I/BB Mayjen Arie J. Kumaat: Sejumlah LSM di Sumbagut dan Jakarta Jual Informasi dan Burukkan Indonesia di Luar Negeri," *SIB*, Medan, 5 Oktober 1994.

28. Lihat INFID, "Review of Advocacy: January-August 1993," Secretariat Jakarta Office/The Hague Office, August 1993; INFID, "Advocacy Programme 1993/1994," *INFID Secretariate*, August 1993. INFID saat itu sedang melakukan advokasi mengenai "Good Governance," sebuah konsep yang diprakarsai oleh Bank Dunia mengenai model manajemen (pemerintahan) yang secara ekonomi dan politik bisa diterima. Kata-kata kuncinya adalah: Transparansi, Konsistensi, *Rule of Law*, dan Demokratisasi.

dan bermula dari Forum Kerjasama Ornop-PBB (*NGO-UN Cooperation Forum*). PDF, dimotori oleh Bina Swadaya dan YIS, pada dasarnya merupakan gambaran kolaborasi Ornop dengan pemerintah yang "tidak mengubah dirinya terhadap kritik yang ada." Mereka cenderung mempertahankan posisi sebagai Ornop besar yang mendapatkan fasilitas dan kedudukan baik dalam kaitannya dengan pemerintah maupun dengan lembaga donor. Karena posisinya ini, PDF lebih diingat sebagai Ornop "pelat merah." INFID secara jelas membedakan dirinya dengan PDF. Misalnya, dalam menanggapi "Keppres LSM," suatu rancangan peraturan tahun 1994 yang hendak membatasi gerak dan peran Ornop,²⁹ aktivis INFID menolak bersatu bersama aktivis PDF karena perbedaan visi politik.

SKEPHI, INFID dan PDF adalah contoh diferensiasi dalam gerakan Ornop. Kalangan Ornop pun mulai saling mempengaruhi dan berusaha memadukan diri ke dalam gerakan demokrasi. Secara kelembagaan mereka berada dalam salah satu kubu, tetapi secara perorangan mereka mempunyai komitmen terhadap gerakan demokrasi. Dengan demikian diferensiasi yang kemudian terjadi mengarah pada pembentukan koalisi yang lebih bebas. Sepanjang tahun 1990-an terbentuk berbagai koalisi antar-Ornop dan Ornop dengan sektor lain yang mengarah pada penggabungan kekuatan demokrasi dalam masyarakat. Generasi yang lebih muda perlahan-lahan mengambil-alih kepemimpinan maupun inisiatif yang membuat kecenderungan lebih bersikap progresif. Watak gerakan demokrasi yang eksplisit dan terus terang mulai terlihat. Tampaknya semakin sukar bagi generasi awal Ornop untuk hanya memikirkan aspek developmentalisme di dalam programnya. Kebutuhan akan adanya gerakan demokrasi saat ini jauh lebih besar ketimbang usaha mempertahankan apa yang ada.

Tahun 1990-an ditandai pula oleh merembaknya forum Ornop. Forum-forum ini

merupakan kelanjutan pengembangan jaringan berbagai forum perintisan dan penguatan yang dibangun pada awal 1980-an dan yang telah ada semenjak pertengahan 1980-an. Forum-forum ini merupakan wadah antar-Ornop dalam mengembangkan kerjasama program/kegiatan yang lebih nyata dan bagian konsolidasi di tingkat wilayah. Namun masih nampak beragam pandangan dan identitas yang hendak dibangun, terutama di daerah, serta sifatnya yang tidak permanen dan tidak struktural. Forum tersebut misalnya, Forum Regional LSM Lampung, Forum Regional LSM Bengkulu, Forum LSM Jawa Tengah, Forum LSM/LPSM DIY, Forum Informasi Komunikasi Sulsel, Baileo Maluku, Forum Kerjasama LSM Irian Jaya.

Masa 1990-an juga ditandai oleh berbagai isu global. PBB telah mengadakan beberapa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT), yakni Lingkungan Hidup di Rio de Janeiro, Brazil; Hak-Hak Asasi Manusia di Wina, Austria; Kependudukan di Kairo, Mesir; Pembangunan Sosial di Kopenhagen, Denmark; dan KTT Perempuan di Beijing, Cina pada September 1995. Berbagai KTT tersebut juga mengakui kehadiran dan sumbangan pikiran NGO, baik sebagai peserta, pengamat maupun di dalam pertemuan NGO-Forum. Setidaknya ini menandai NGO sebagai salah satu aktor global yang pantas diperhitungkan. Hal tersebut juga mengawali bentuk pengadopsian baru organisasi internasional maupun pemerintah untuk menggunakan NGO sebagai instrumen mereka. NGO mulai dikooptasi ke dalam kebijakan pemerintah — disebut sebagai GONGO (*Government NGO*). Misalnya, YPB (Yayasan Pembangunan Berkelanjutan) atau Yayasan Kehati (Yayasan Keanekaragaman Hayati) maupun Ornop lain yang didirikan oleh mantan pejabat pemerintah atau berafiliasi secara informal dengan program pemerintah. Ini merupakan tarik-menarik dalam berbagai aras, namun Ornop akan menemukan identitasnya yang tidak begitu saja dapat direkayasa.³⁰

Kalangan Ornop juga mulai memberi perhatian akan perlunya kekuatan sektor lain

29. Lihat "Konsep Bahasan Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan," disajikan pada Forum Komunikasi dan Konsultasi antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada tanggal 10-11 Februari 1994 di Cisarua, Jawa Barat, Dirjen Sospol, Depdagri, Ditpemmas.

30. Lihat, "Emil Salim: Perlu Dibentuk Jaringan LSM AIDS," *Kompas*, 18 April 1995.

untuk tumbuh. HCJ Princen dari LPHAM (Lembaga Pembelaan Hak-Hak Asasi Manusia) bersama dengan aktivis Ornop lain mendirikan SBMSK (Serikat Buruh Merdeka Setia Kawan) pada bulan November 1990.³¹ Serikat buruh ini merupakan alat untuk mendobrak sistem wadah tunggal ormas buruh yang selama itu dimonopoli oleh SPSI. Meskipun mendapat tekanan, kehadiran sebuah serikat buruh bebas terlihat menjadi mungkin. SBMSK mati bukan karena tekanan pemerintah, melainkan ketidaksiapan aktivisnya dalam membangun sebuah serikat buruh. Demikian pula kemunculan SBBT (Serikat Buruh Bebas Transportasi) yang disokong INFIGHT mengalami hal serupa seperti SBMSK. Lagi-lagi kelemahan berada pada aktivisnya, bukan pada tekanan eksternal.

Bulan April 1992 berdiri serikat buruh bebas baru, SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) yang juga berasal dari kalangan Ornop. Belajar dari kesalahan SBMSK tempat bergabung sebelumnya, Mughtar Pakpahan mencoba mengembangkan sebuah serikat buruh yang lebih *solid*. Organisasinya diarahkan berbasis sosial dan mewakili kalangan buruh.³² Meskipun menyandang pelbagai kelemahan, SBSI muncul sebagai organisasi yang mendapat simpati kalangan luas termasuk dari organisasi buruh internasional. Perkembangannya yang pesat ternyata mampu mengancam keberadaan SPSI. Untuk sementara waktu SBSI melemah karena tersandung "kasus Medan" dan penangkapan terhadap Pakpahan. Namun SBSI telah mengawali gebrakan yang baru; aktivis Ornop seharusnya mengembangkan asas garis massa dalam gerakan rakyat, bukan berputar dalam kepentingan kelas menengah aktivis Ornop. SBSI juga telah memulai upaya praksis dan bukan sekedar retorika radikal.

Perkembangan lain yang menarik adalah tumbuhnya gerakan feminisme, yaitu gerakan

yang menentang sistem patriarki dan melakukan pembaruan untuk emansipasi (pembebasan) perempuan. Tidak dapat disangkal, inisiatif gerakan feminisme nasional kelak akan bermula dari kalangan Ornop. Setelah lenyapnya gerakan feminisme sejati dan representatif dalam zaman Orde Lama serta Orde Baru yang mensubordinasikan "kaum perempuan,"³³ kini secara perlahan tumbuh kembali embrio gerakan feminisme. Karena lebih leluasa tanpa ikatan birokratis dan kemampuan individual yang dimiliki, Ornop perempuan mempunyai potensi berkembang ke arah organisasi perempuan nasional. Berawal di tahun 1980-an dengan kemunculan YASANTI (Yayasan Annisa Swasti, 1982) di Yogyakarta, Kalyanamitra (1985) di Jakarta, dan PPSW (Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita, 1986) di Jakarta; setelah itu tumbuh Ornop perempuan baru, seperti FDPY (Forum Diskusi Perempuan Yogya), Solidaritas Perempuan, YPM (Yayasan Perempuan Mardika), LSPPA (Lembaga Studi Pengembangan Perempuan dan Anak), serta Ornop perempuan lainnya. Kehadiran mereka semula kurang *solid* akibat kurangnya perspektif yang jelas mengenai kedudukan dan tujuan gerakan feminisme saat itu.³⁴ Tiadanya dukungan atau bahkan penolakan Ornop lain (di luar Ornop perempuan) yang melihat mereka "kurang penting" dan, terutama, masih kuatnya ideologi patriarki di sebagian besar aktivis Ornop merupakan problem mereka yang lain. Patriarki, secara sadar ataupun tidak, nampak di dalam struktur, manajemen, program dan pola kepemimpinan Ornop pada umumnya.

Seiring dengan semakin banyaknya ke-

31. *First Congress SETIA KAWAN Free Trade Union*, Jakarta, December 15-16, 1990; "Press Release The Setia Kawan Free Trade Union," June 10, 1991, dalam *Newsletter LPHAM*, Vol. I, No. 1, July 1991.

32. Lihat brosur "Serikat Buruh Sejahtera Indonesia: Dewan Pengurus Pusat." Pada Oktober 1993, SBSI mengklaim telah mempunyai 87 cabang di seluruh Indonesia dan mempunyai 150.000 orang anggota.

33. Lihat Yulia I. Suryakusuma, "Ibuisme Negara: Konstruksi Sosial Keperempuanan Indonesia Orde Baru," Ringkasan tesis MA "State Ibutism: the Social Construction of Womanhood in the Indonesian New Order" (ISS, Den Haag, 1987); Nuri Soeseno, "Masalah Representasi Dalam *State Dominated Group* Organisasi-Organisasi Wanita di Indonesia," Pertemuan nasional Ornop Perempuan untuk Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Jakarta, Juni 1994.

34. Lihat, Wardah Hafidz, "Gerakan Perempuan Dulu, Sekarang dan Sumbangannya Kepada Transformasi Bangsa," dalam Fauzie Ridjal et.al, *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia* (Yogyakarta: Yayasan Hatta, LSPPA, Yayasan Prakarsa dan FES, 1993), hal. 96-97.

lompok perempuan dan kualitas aktivisnya yang juga semakin meningkat, berkembang perspektif gender (sebagai alat analisa feminisme) yang mengkritik pendekatan WID (*Women in Development*). Pendekatan bersifat developmentalis selama ini dipakai (tanpa disadari) oleh kalangan Ornop dan lembaga donor.³⁵ Dengan perspektif gender, aktivis/Ornop perempuan mulai mendapatkan ide dasar yang bisa diterima dan dipahami masyarakat luas dalam menjelaskan masalah keter tindasan perempuan. Merebaknya forum, pertemuan dan jaringan di antara aktivis/Ornop perempuan, mengakibatkan menguatnya saling hubungan yang lebih intens. Selain tertuju kepada aktifitas perempuan, terbuka pula pandangan Ornop dan individu untuk mempunyai perhatian terhadap gerakan feminisme yang semula belum menyadari betapa pentingnya persoalan ini. Muncul kesadaran di berbagai kalangan bahwa para feminis juga berjuang bagi gerakan demokrasi yang lebih luas, tidak sebatas pembebasan perempuan dari ketidakadilan.³⁶ Karena itu, berdasarkan kapasitas dan pemikiran yang dibutuhkan dalam membangun gerakan feminisme dan gerakan demokrasi, tidak dapat dipungkiri bahwa Ornop perempuan di masa mendatang akan memainkan peran lebih besar.³⁷

Ornop Bergerak

Selama ini Ornop mengandung arti "oposisi" dimata pemerintah. Para pejabat

35. Lihat Mansour Faqih, "Teori Pembangunan dan Nasib Kaum Perempuan: Sebuah Pengantar Kritis."

36. "Kaum Feminis menganggap bahwa perempuan tidak hanya harus berjuang menentang diskriminasi, tetapi juga berjuang demi emansipasi serta pembebasan dari segenap bentuk penindasan oleh pemerintah, oleh masyarakat serta oleh kaum lelaki," lihat, Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, *Persoalan pokok Mengenai Feminisme dan Relevansinya* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama dan Kalyanamitra, 1995), hal. 7-8.

37. Lihat misalnya Tati Krisnawaty, "Peluang Kerja Perempuan Miskin dan Strategi Survive," dalam Ridjal et.al, *op.cit.*, hal. 164-165; Wardah Hafidz, "Sumbangan Gerakan Perempuan Dalam Proses Demokratisasi Masyarakat Indonesia," dalam Ridjal et.al, *op.cit.*, hal. 135-137; Susan Blackburn, "Gender Interest and Indonesian Democracy," paper dalam Conference on Indonesian Democracy, 1950s-1990s, Monash University, Australia, 17-20 Desember 1992, hal. 17-20.

pemerintah dalam berbagai kesempatan secara jelas selalu melempar kecurigaan bahkan melakukan berbagai tekanan kepada Ornop.³⁸ Perlakuan demikian malah menyebabkan Ornop menjadi lebih "bersatu" ketimbang masa sebelumnya. Perkembangan politik yang cenderung semakin konservatif memang menempatkan Ornop dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pemerintah yang kurang menyadari fungsi kontrol Ornop, justeru menganggap Ornop sebagai bagian dari upaya oposisi dalam negeri.³⁹ Dengan demikian perbedaan tajam interen Ornop semakin terlupakan, karena mereka harus menghadapi tuduhan yang sama dari pemerintah. Terjadi semacam "pencairan" di dalam dan Ornop pun mendapatkan "ideologi" pemersatu yakni "gerakan demokrasi dan hak asasi manusia (HAM)."⁴⁰ Dapat dilihat bahwa posisi politik dan ideologi Ornop sekarang terutama terbentuk karena situasi dan karakter sistem politik yang sedang berlangsung. Mereka masuk ke dalam situasi yang tak bisa ditolak untuk bergandengan bersama dalam

38. Letjen HR Hartono saat menjabat Kassospol ABRI berucap, "mereka adalah oknum-oknum yang berupaya mengembangkan pengaruh dan merongrong kewibawaan pemerintah serta ABRI," dalam *GATRA*, No. 17, Th. 1, 11 Maret 1995, hal. 16; lihat juga, "Rudini Panggil LSM: Kalau Ndalek Ya Kita Tindak," *Media Indonesia*, 10 Agustus 1989; "Tokoh LSM Maiyasyak Johan SH 'Dijemput' Polisi Medan Setiba Dari Jakarta," *SIB*, Medan, 19 September 1994; "Diskusi Forum LSM-LPSM di Yogya Dihentikan," *Kompas*, 23 September 1994; "Sara-sehan LSM-LPSM Se-Jawa Dihentikan Karena Tak Berizin," *Kompas* 28 September 1994; "LSM Yang Merongrong Wibawa Pemerintah Perlu Perhatian," *Media Indonesia*, 7 November 1994; dan lain-lain.

39. Misalnya sikap pemerintah terhadap INGI sejak kemunculannya pada 1985 dengan menuduh INGI "menjual nama bangsa," "tidak nasionalis" dan lainnya serta menekan beberapa tokohnya; juga, Andrew Pinney yang menulis hambatan yang ada dalam kolaborasi antara NGO dengan pemerintah dalam, "Partners in Development: The Government and NGOs in Indonesia," *PRISMA Indonesian Indicator*, No. 28, June 1983, hal. 33-45.

40. Lihat misalnya publikasi INDEMO (*Indonesian NGOs for Democracy*), *A Country Report: The Other Portrait of Indonesia: The Struggle for Democracy and Human Dignity*, Jakarta, 1994, yang merupakan pernyataan sikap delegasi LSM Indonesia ke Konferensi hak asasi manusia di Wina, Austria; juga INDEMO, *Joint Declaration on Human Rights*, Jakarta, June 1993. Deklarasi ini ditandatangani oleh 52 Ornop (109 aktivis).

perjuangan demokrasi. Ini sebenarnya unsur kunci dalam perkembangan Ornop sekarang di tengah situasi "tiadanya harapan akan keterbukaan politik yang minimal sekalipun."

Sebagai sebuah gerakan kelas menengah yang memperjuangkan demokrasi, Ornop tidak dapat dipisahkan dengan gerakan rakyat. Sejak tahun 1980-an dimulai diskursus bagi pemikiran dan visi baru Ornop yang menolak dan mengkritik secara tegas kecenderungan developmentalisme di dalam diri sendiri. Kesadaran perlunya "gerakan rakyat" di dalam Ornop juga disadari oleh kalangan Ornop besar.⁴¹ Karena interaksi antaraktivis dan kritik yang dilakukan dari dalam oleh kalangan yang lebih muda, menyebabkan dimulainya usaha untuk memasukkan aspek gerakan rakyat ke dalam Ornop. Adnan Buyung Nasution, misalnya, mengatakan, "LBH berketetapan untuk membantu dan kerjasama untuk membangun kekuatan prodemokrasi yang lebih besar dan lebih *solid*, sehingga bisa mengubah keadaan sekarang ini menjadi tumbuhnya kembali kekuatan rakyat, atau dengan kata lain membangun *civil society*."⁴² Demikian pula dengan rumusan Ornop semacam Bina Desa, "melayani pertumbuhan prakarsa masyarakat dan aktualisasi potensi-potensi transformatif masyarakat; memperkuat organisasi rakyat; memperkuat jaringan gerakan demokrasi pada semua tingkat dan sektor kehidupan; aktif dan efektif dalam pembelaan isu demokrasi dan ketidakadilan."⁴³

Hal ini dapat pula dilihat dalam PERAN (Pergerakan Emansipasi Rakyat Nusantara) dengan M.M Billah sebagai tokohnya. PERAN merupakan Ornop yang hendak menjembatani pengertian antara gerakan Ornop dengan gerakan rakyat. Di dalam PERAN

setidaknya telah terjadi interaksi luar biasa dari berbagai generasi Ornop yang menyebabkan munculnya pemahaman antar-aktivis.⁴⁴ Perdebatan semula agak membingungkan karena PERAN tidak memisahkan keberadaan mereka sebagai kelas menengah dengan voluntarisme mereka dalam gerakan rakyat (misalnya dalam gerakan buruh atau petani). Namun jelas usaha untuk mensintesakan Ornop dengan gerakan rakyat telah dimulai. PERAN merupakan salah satu percobaan unik yang dilakukan Ornop guna mentransformasikan diri ke dalam gerakan rakyat. Memang masih harus ditunggu apakah PERAN bersungguh-sungguh dengan upayanya atau hanya sekedar retorika kelompok kelas menengah.

Munculnya aliansi di dalam Ornop atau dengan sektor mahasiswa dan intelektual, akhir 1980-an dan awal 1990-an, memperkuat desakan pengintegrasian mereka ke dalam gerakan demokrasi dan gerakan rakyat. Misalnya, Fordem (Forum Demokrasi) yang terdiri dari aktivis Ornop dan aktivis bebas lainnya; INFIGHT (*Indonesia Front for the Defense of Human Rights*) yang merupakan aliansi mahasiswa-Ornop dalam kasus hak-hak asasi; Forsol (Forum Solidaritas untuk Buruh), aliansi Ornop di bidang perburuhan; KPKP (Kelompok Perempuan untuk Kebebasan Pers), aliansi luas aktivis/Ornop perempuan yang terbentuk menyusul pembredelan *Tempo*, *Detik*, dan *Editor*; KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria), aliansi luas dari Ornop dalam advokasi pembaruan agraria; KIPP (Komite Independen Pemantauan Pemilu), aliansi luas dari Ornop, mahasiswa, kalangan intelektual dan individual terkemuka.

Kecenderungan Ornop untuk menjadi bagian dari gerakan rakyat memang tidak bisa diabaikan. Sesungguhnya ini merupakan

41. Lihat misalnya tulisan M. Dawam Rahardjo, "Gerakan Rakyat dan Negara," dalam *Prisma*, No. 11, 1985, hal. 3-15; Aswab Mahasin, "Pola Gerakan Pingiran," *Prisma*, No. 7, 1989, hal. 3-11.

42. Adnan Buyung Nasution, *loc.cit.*, hal. 12.

43. Kartono, "Pengalaman Bina Desa Dalam Memperkuat Rakyat: Tantangan, Peluang dan Prospek," dalam Seminar Refleksi Pengalaman Dua Dasawarsa LSM dan Agenda Dasawarsa 1990-an, Jakarta, 1-2 September 1994, hal. 1.

44. Lihat beberapa publikasi laporan CPSM/PERAN: "Gerakan Transformasi Sosial Untuk Menegakkan Kedaulatan Rakyat di Dalam Masyarakat Sipil Yang Kokoh: Fajar Baru Bagi Ornop," laporan workshop perencanaan CPSM, Bogor, Januari 1994; "Ornop Mencari Format Baru: Laporan Pertemuan Cisarua," Bogor, Juni 1993; "Laporan Kunjungan Dialog Tentang Visi, Masalah, Posisi dan Paradigma Ornop di Indonesia Serta Upaya Untuk Mengatasinya," 1993; "Laporan Pokker Pendidikan Kader," 1993; "Laporan Pokker Think Tank," 1993.

bagian dari pengadopsian nilai-nilai baru gerakan rakyat. Contoh yang baik adalah rumusan Kode Etik Ornop susunan Badan Musyawarah Bina Desa yang telah mengadopsi nilai-nilai gerakan rakyat. Disebutkan, "sesungguhnya kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dengan insan LSM-nya adalah untuk mengemban misi mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan demokratis (Mukadimah, paragraf 1); Insan LSM adalah orang yang terpenggil untuk mengabdikan dirinya bagi pembebasan rakyat dari segala bentuk ketidakadilan (Bab I, Pasal 1.1.); Insan LSM senantiasa melakukan penggalangan kebersamaan pada semua tingkat lapisan masyarakat dalam membela rakyat (Bab I, Pasal 1.4.); Insan LSM senantiasa berjuang untuk mewujudkan demokrasi dan karenanya selalu bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan demokratis untuk mencapai susunan masyarakat demokratis yang tanpa kekerasan (*non-violence*) dalam semua dimensinya."⁴⁵

David C. Korten mencoba merumuskan gerakan rakyat dalam perspektif "Pembangunan Berpusat Rakyat" (*People Centered Development*). Berdasarkan pengalaman dalam berhubungan dengan lembaga pembangunan, Ornop, dan terutama dengan USAID, Korten sampai pada perumusan kerangka kerja Ornop. Kerangka kerja ini disebut sebagai skema generasi Ornop, yaitu: (1) Generasi Kesatu: Bantuan Peringatan dan Kesejahteraan; (2) Generasi Kedua: Pembangunan Masyarakat; (3) Generasi Ketiga: Pembangunan Sistem Berkelanjutan; dan (4) Generasi Keempat: Gerakan Rakyat. Penjelasan yang dilakukannya dalam beberapa hal cukup menarik, bahkan banyak Ornop di Indonesia yang kemudian mengadopsi teorinya. Tetapi skema yang diajukan Korten, terutama pada konsep generasi, terlihat mengandung kelemahan. Skemanya lebih pantas ditempatkan dalam sebuah kategorisasi dan bukan sebagai sebuah konsep generasi yang evolusioner dan linear. Rumusannya mengenai tujuan gerakan rakyat adalah, "menggerakkan sebuah massa kritis yang penuh dengan inisiatif

mandiri dan tidak tersentralisir agar mendukung suatu visi sosial." Menurutnya, "tugas organisasi sukarela generasi keempat adalah menggabungkan dan menggerakkan jaringan swakelola yang sama sekali tidak di bawah kekuasaannya. Ini harus dicapai terutama melalui kekuatan gagasan, nilai-nilai dan hubungan komunikasi."

Rumusan Korten mengenai gerakan rakyat sebenarnya cukup baik, terutama bila dikaitkan dengan gerakan masyarakat sipil. Penekanan pada "tindakan sukarela" di dalam gerakan Ornop merupakan prinsip penting yang sebaiknya bisa secara tajam dirumuskan sebagai "komitmen sosial politik." Tetapi Korten masih berada dalam paradigma "developmentalis," terlihat dari kritiknya terhadap pembangunan yang masih selalu berputar pada hambatan birokrasi dan institusional, serta perlunya partisipasi rakyat dalam pembangunan. Korten tidak pernah mempersoalkan sistem kapitalisme dan akibat strukturalnya bagi masyarakat Dunia Ketiga. Dia pun mengabaikan jalinan hegemoni global badan internasional seperti Bank Dunia dan USAID. Korten melihat hambatan alamiah yang ada dengan sendirinya dari sebuah lembaga donatur besar, bukan pada watak inheren badan tersebut dalam sistem kapitalisme global.⁴⁶

"Gerakan rakyat" selama ini sering dipahami dari artinya yang pernah ada sebelumnya; saat organisasi massa rakyat menjadi afiliasi atau "*onderbouw*" partai politik. Pengertian ini menjadi kurang *genuine* karena rakyat diletakkan sebagai alat yang sah dari sebuah partai politik dengan perangkat ideologinya. Menurut tinjauan politik lama, keberadaan gerakan rakyat harus dilihat kaitannya dengan partai politik. Hal demikian menyebabkan manipulasi di dalam partai politik. Meskipun rakyat dapat menyampaikan aspirasi ke partai politik, tetapi tidak dengan sendirinya organisasi rakyat identik dengan partai politik baik dalam pemikiran

45. *Pedoman Perilaku ('Kode Etik') Kemitraan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)*, (Jakarta: Sekretariat Bina Desa, 1994).

46. Lihat bukunya yang cukup komprehensif mengenai visi dan peran Ornop, David C. Korten, *Menuju Abad Ke-21: Tindakan Sukarela dan Agenda Global* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan Pustaka Sinar Harapan, 1993), terutama hal. 184-215.

maupun ideologi. Dalam perkembangannya, organisasi rakyat dan gerakan rakyat mempunyai aspirasi sendiri lebih murni yang menolak tunduk pada kemauan partai politik. Gerakan rakyat mempunyai aspek murni sebagai "demokrasi langsung" dari-oleh-untuk rakyat tanpa memerlukan mediasi partai politik atau kelompok kepentingan.⁴⁷

Nampak adanya persinggungan antara Ornop dengan organisasi rakyat. Meskipun masih tampak kebingungan di sekitar peran Ornop dalam organisasi rakyat ataupun posisi Ornop dalam gerakan rakyat, sebenarnya mulai muncul perkembangan yang dapat memperjelas hal ini. Dunia sekarang menghadapi suatu situasi yang sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Dunia kini berada dalam masa pasca Perang Dingin dan pasca-konflik AS-US; terutama berakhirnya Uni Sovyet dan tenggelamnya partai-partai komunis di Eropa Timur. Akibatnya, dibutuhkan suatu pendefinisian kembali tentang gerakan rakyat. Selain itu, terutama karena semakin besarnya pengaruh NGO di Barat, juga memberi definisi baru mengenai gerakan rakyat. Dalam hal ini agaknya perlu dilihat perbedaan paradigmatik antara gerakan rakyat lama dengan gerakan rakyat baru.

Paradigma gerakan rakyat lama mulai usang semenjak kegagalan Sosialisme ala Blok Timur (Leninisme/Stalinisme). Paradigma ini menekankan bahwa gerakan rakyat dalam tingkatan yang tertinggi adalah partai politik. Karena itu gerakan rakyat harus tunduk pada kepentingan partai. Partai menerapkan dan mewujudkan programnya lewat negara, dan birokrasi. Konstelasi yang demikian menghasilkan lemahnya posisi gerakan rakyat. Pihak yang dirugikan adalah rakyat. Aspek kedua terpenting, karena lemahnya kontrol rakyat dan kuatnya dogma ideologi,

47. Ini merupakan cermin dari bangkitnya gerakan rakyat baru di dunia. Mereka tidak terikat partai politik atau ideologi tertentu, tetapi terikat pada perjuangan sejati rakyat. Misalnya *Solidarnosc* di Polandia, sebuah gerakan buruh bebas di luar Partai Komunis dan serikat buruh resmi, yang dipimpin Lech Walesa; lihat John A. Moses, *Trade Union Theory From Marx to Walesa* (New York: Berg Publisher Ltd, 1990); Chico Mendes, *Berjuang Menyelamatkan Hutan* (Jakarta: WALHI dan Yayasan Obor Indonesia, 1994).

menyebabkan tiadanya kesadaran di tingkat negara dalam soal mendasar seperti, hak asasi manusia, lingkungan hidup, posisi kaum perempuan, keberlangsungan sumber daya alam dan isu lain. Ini menyebabkan paradigma lama berakhir bangkrut dan usang akibat visi yang tidak melihat ke depan.

Paradigma gerakan rakyat baru membuat semacam koreksi dengan landasan bahwa gerakan rakyat merupakan bagian paling murni dan karenanya harus merupakan sesuatu yang otonom. Gerakan rakyat merupakan bagian dari kontrol paling efektif dalam menjaga kemurnian hak-hak maupun nilai-nilai dasar kemanusiaan. Gerakan rakyat yang murni tidak akan dapat dimanipulasi. Dengan demikian gerakan rakyat memikirkan juga bagaimana menjaga keberlangsungan hak-hak dasar manusia, yaitu sumber daya alam, lingkungan hidup, hak-hak asasi dan keberlangsungan umat manusia. Di dalam gerakan rakyat diperkuat kembali gerakan kaum perempuan yang mampu mengoreksi aspek *inhumanity* yang tumbuh dari sistem patriarki. Juga aspek penting lainnya bagi emansipasi manusia sepenuhnya, seperti menghormati perjuangan masyarakat adat (*indigenous people*) dalam menjaga lingkungan dan keberadaannya. Ini semua memberi aspek sangat kuat dari paradigma baru yang intinya mempermasalahkan "pertaruhan umat manusia dalam situasi global sekarang di bumi yang hanya satu."

Gerakan rakyat dalam hal ini telah mendapat elaborasi baru. Gerakan rakyat kini dicoba diperjelas lewat konsep "masyarakat sipil" (*civil society*). Emil Salim dalam kaitan ini secara tepat menyebut Ornop sebagai "*Civil Society Organization*" atau "*Civil Society Institution*."⁴⁸ Konsep masyarakat sipil dianggap cukup mampu menjelaskan posisi Ornop, organisasi rakyat, partai politik dan kelompok kepentingan lainnya, dalam perjuangan secara langsung menghadapi negara yang tidak demokratis.⁴⁹ Ornop sesungguhnya

48. "Emil Salim ...," *op.cit.*, menurutnya, "tugas mereka bikin *critical mass*. Dengan *critical mass* lahirlah *Civil Society Organization*."

49. Konsep "Negara" mendapat kritik pedas dan mulai diupayakan mendefinisikan konsep "Negara" yang

nya telah memulai upaya intelektual bagi pemikiran-pemikiran semacam itu. Apa yang dilakukan oleh, misalnya, PERAN dan berbagai pertemuan reflektif lainnya akan mengugah mereka untuk semakin menyadari dan merumuskan soal ini.⁵⁰

Untuk sementara menarik untuk melihat apa yang disampaikan Roem Topatimasang dengan Bagan "Lima Paradigma Dasar" Ornop yang coba dirangkumnya dari pandangan Hope, Timmel, Eldridge, Kothari, dan Baradat. Lima paradigma tersebut adalah (1) Kesejahteraan, (2) Modernisasi, (3) Reformasi, (4) Liberasi, dan (5) Transformasi. Dua yang pertama beraliran politik konservatif, yang ketiga beraliran liberal dan dua yang terakhir beraliran radikal. Selain itu Roem juga membuat spektrum yang memetakan posisi Ornop berdasarkan paradigma tersebut.⁵¹ Bagan yang dibuat Roem merupakan penjelasan memadai dalam mengenali paradigma dasar Ornop (dan para aktivisnya). Namun Roem tergelincir ketika memasukkannya ke dalam spektrum politik-ideologis dan memasukkan Ornop-ornop yang ada ke dalam kategorinya. Roem memang memiliki pengetahuan luas tentang Ornop, tetapi kategorisasinya mendapat banyak kritik. Keberatan yang diajukan aktivis Ornop dapat dipahami mengingat bagan paradigma Roem tidak bisa begitu saja diterapkan ke dalam spektrum politik-ideologis, apalagi di tengah formasi politik yang tertutup dan sedang dalam masa peralihan.

Paradigma gerakan rakyat baru dalam hal ini cocok dengan pengertian paradigma "liberasi" dan "transformasi" dari pandangan politik yang radikal. Namun arti "radikal" bukan sebagai radikal-anarkis (sebagaimana Roem menyebut Moore, Gandhi, Lennon

sebagai kaum anarkis) melainkan radikal-progresif, yaitu pandangan yang mengarah pada kemajuan kualitas umat manusia. Dalam hal ini tetap ada perbedaan antara gerakan rakyat dengan gerakan masyarakat sipil. Gerakan masyarakat sipil adalah gerakan keseluruhan masyarakat (publik) yang menginginkan kemajuan kualitatif, sedangkan gerakan rakyat adalah gerakan kaum massa miskin dan tertindas. Keduanya saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Meskipun demikian masih diperlukan sintesa yang lebih memuaskan antara gerakan rakyat dengan gerakan masyarakat sipil.

Menuju Formulasi Teori

Tidak ada gerakan revolusioner tanpa teori revolusioner. Demikian pula tidak ada gerakan pembaruan tanpa teori pembaruan. Ornop pada akhirnya mulai menyadari akan pentingnya merumuskan teori guna memandu gerakannya. Upaya-upaya untuk merumuskan hal tersebut telah banyak dilakukan, sebagaimana terlihat di atas. Sebagai gerakan yang berdasarkan pada kepentingan luas, yang di dalamnya terdapat berbagai pandangan dan pengelompokan, tampaknya Ornop perlu merumuskan teori yang bersifat fleksibel, dapat diterima berbagai pihak, dan tetap tajam.

Dalam hal ini Ornop lalu menggunakan teori *civil society* untuk menjelaskan kepentingan dan tujuannya. Meskipun berasal dari konteks masyarakat Barat dalam masa peralihan ke kapitalisme dan ditegakkannya demokrasi borjuasi, teori ini kemudian berkembang sebagai teori antidominasi dan anti-hegemoni "negara," atau kontradiksi permanen terhadap negara, serta memposisikan kekuatan masyarakat sipil di dalamnya. Konsep tentang masyarakat sipil merupakan formulasi dari masyarakat politik Barat yang mengalami perkembangan dari masyarakat alamiah (*natural society*) dan masyarakat politik (*political society*). Masyarakat alamiah adalah masyarakat yang belum mengenal sistem maupun hukum sehingga merupakan masyarakat anarki (seperti adanya perbudakan dan kesewenang-wenangan). Sementara masyarakat politik adalah masyarakat yang mulai mengenal arti politik sebagai otoritas

bisa diterima, lihat misalnya, Rajni Kothari, "Masses, Classes and The State," dalam Ponna Wignaraja (ed.), *New Social Movements in The South: Empowering the People* (London: Zed Books, 1993), hal. 74-75.

50. Lihat, berbagai diskusi intensif di Salatiga, Bandung, Boyolali, dan Jakarta yang diselenggarakan Indeco dan tertuang dalam *Laporan Diskusi Studi Tentang LSM*, Indeco de Unie, 1993.

51. Roem Topatimasang, "Strategi Pengembangan LSM Untuk Rakyat Miskin," pengantar diskusi untuk Sarasehan LSM Jawa Timur dalam rangka ulang tahun ke-21 YLBHI di LBH Surabaya, 1991.

sehingga tercipta aturan dan hukum. Sedangkan masyarakat sipil adalah masyarakat politik yang telah mengenal, menghormati, dan melindungi hak-hak dasar/hak asasi manusia (*human rights*) warganya. Ini yang kemudian dikenal sebagai hak-hak sipil (*civil rights*).

Arief Budiman mencoba meringkas pemikiran Hegelian, Marxian dan Gramscian sebagai tiga pendekatan masyarakat sipil.⁵² Ketiga pendekatan sebenarnya mengacu pada satu hal, yaitu tumbuhnya masyarakat yang berkelas sosial moderen seperti yang dijumpai sekarang dalam hubungannya dengan negara. Konteks masyarakat Barat (liberal) sekarang adalah dihormatinya kebebasan individu (yang merupakan pilar utama masyarakat), sedangkan yang dijumpai pada masyarakat pasca kolonial Dunia Ketiga adalah besarnya kekuasaan negara/pemerintah yang mendapat justifikasi dari nilai-nilai feodal lama. Karena itu salah satu unsur utama masyarakat sipil yakni kebebasan individu tidak bisa diterapkan dalam masyarakat pasca kolonial karena dapat mengancam sendi-sendi kekuasaan. Ini menjadi topik utama perdebatan HAM versi Barat dengan versi Asia. Persoalannya bukan pada siapa yang lebih diutamakan, individu atau negara; individu di Barat juga sudah diatur sedemikian rupa oleh negara, sementara ada (segelintir) individu di Asia yang realitasnya bisa berkuasa mengatur negara. Dalam hal ini pandangan Barat lebih argumentatif, yaitu pada filsafat manusia; sedangkan Asia lebih pada filsafat feodal (paternalistik) atau praktek otoritarian.

Rajesh Tandon, dengan mengutip Bratton, menyebutkan masyarakat sipil terdiri dari tiga unsur. *Pertama*, basis material sumber daya untuk pemanfaatan produktif. *Kedua*, basis institusional dari kelompok-kelompok atau asosiasi, serta inisiatif untuk mengelola masyarakat sipil. *Ketiga*, basis ideologis dari nilai, norma dan ideal yang menyediakan legitimasi

dari *governance*. Persoalan yang muncul adalah negara maupun elite penguasa telah mengambil alih semua basis tersebut, baik dalam basis material (hutan, tanah, air, dan sebagainya), basis institusional (kelembagaan masyarakat), dan basis ideologis (media, pendidikan, kebudayaan).⁵³ Karena itu, menurut Tandon, NGO/Ornop mempunyai peran strategis untuk menangani isu-isu masyarakat sipil tersebut melalui akses yang lebih besar dalam (dan untuk) mengontrol sumber daya yang dilakukan oleh komunitas lokal dan organisasi rakyat, memperkuat masyarakat sipil menghadapi hegemoni negara dan sektor bisnis, serta memperkuat saling keterkaitan di antara masyarakat sipil — atau "masyarakat sipil internasional" — dalam menghadapi kekuatan modal swasta (multinasional) dan aparat negara (struktur global/regional dari lembaga antar negara).⁵⁴

Ini merupakan perumusan bagi peran Ornop yang cukup baik sebagai gerakan menyeluruh dari berbagai sektor masyarakat yang bersifat nonnegara. Di dalamnya tercakup berbagai pengertian dan formulasi gerakan-gerakan yang hidup dalam masyarakat, seperti gerakan lingkungan hidup (ekologis), konsumen, perempuan, masyarakat adat, hak asasi manusia, kebebasan sipil, buruh, tani, nelayan, kaum profesi, pedagang kecil, ekonomi rakyat, dan lain-lain yang akan terdiferensiasi secara luas. Semakin intensifnya ekspansi modal internasional dan domestik, penetrasi blok ekonomi regional, pengaturan GATT/WTO, dan negara sebagai instrumen darinya, akan semakin tumbuh pula Ornop sebagai pengimbang dan kekuatan kontrol, atau *counter hegemony* dan *counter discourse* terhadap developmentalisme.⁵⁵ Sintesa antara gerakan rakyat dan masyarakat sipil lambat laun akan terjadi. Tugas Ornop dan organisasi rakyat untuk mensintesa hal tersebut menjadi kenyataan, sehingga memperkuat aspek teori yang

52. Arief Budiman, "Introduction: From A Conference to A Book," dalam Arief Budiman (ed.), *State and Civil Society in Indonesia*, Monash Papers on Southeast Asia - No.22, 1990, hal. 3-5. Lihat juga M.M. Billah, "Peran Ornop Dalam Proses Demokratisasi Yang Berkedaulatan Rakyat," dalam "Seminar Refleksi 1994," *op.cit.*, hal. 1-3.

53. Tandon, *loc.cit.*, hal. 128-129.

54. *Ibid.*, hal. 134-135.

55. Lihat M. Dawam Rahardjo, "Tiga Dasar Teori Tentang LSM," dalam *Republika*, 9 November 1994, yang memakai teori Tiga Sektor untuk menerangkan teorinya; M.M. Billah, *op.cit.*, 1995, hal. 26.

sekarang masih terasa lemah. Beruntung Ornop mempunyai refleksi lebih dari cukup untuk memulai perumusan yang lebih memadai dengan nilai-nilai baru atau memperbarui nilai yang dimiliki sekarang seperti hak asasi manusia, nonkekerasan, kesetaraan gender, berwawasan ekologis/lingkungan hidup, berorientasi kekuatan rakyat, berkelanjutan, pluralisme, kerakyatan, demokratis, sosialis-tis, dan religiusitas. Nilai-nilai inilah yang harus terus dijaga dan diperjuangkan karena merupakan nilai ideal umat manusia.

Kesimpulan

Melihat perkembangan dan kecenderungan yang terjadi selama ini, Ornop tampak telah memberi sumbangan penting. *Pertama*, mulai dihilangkannya sekat-sekat ideologi lama dan aliran politik tradisional (primordial). Dalam interaksinya, para aktivis generasi pertama menyadari tidak relevannya lagi mempermasalahkan soal tersebut. *Kedua*, otokritik dan kritik dari luar (gerakan mahasiswa) telah membawa mereka pada beberapa kesimpulan baru yaitu keberadaan Ornop yang terkait dengan gerakan demokrasi dan gerakan rakyat. *Ketiga*, pencarian paradigmatis dan teoritis membawa mereka kepada teori masyarakat sipil. Ornop merupakan bagian dari perjuangan masyarakat sipil. *Keempat*, semua dinamika tersebut mencerminkan adanya paradigma gerakan rakyat baru; di mana mereka terlibat di dalamnya dan sedang berupaya memperjuangkan se-

buah tatanan masyarakat baru. *Kelima*, Ornop telah menjadi aktor global yang terikat isu dan internasionalisme gerakan Ornop. Pasar bebas dan kapitalisme internasional akan masuk secara leluasa ke berbagai pelosok negeri (GATT/WTO, Blok Ekonomi Regional), maka Ornop pun akan mengalami globalisme. Batasan nasional mulai mengalami pengikisan arti dan kurang relevan lagi dalam beberapa hal. *Keenam*, gerakan ini akan mengacu pada perspektif dunia yang baru, yaitu dunia tanpa kekerasan, tanpa ideologi patriarki, tanpa penindasan, tanpa pelanggaran hak asasi manusia, tanpa elitisme, tanpa kapitalisme, dan tanpa segala hal yang merusak pencapaian peradaban manusia.

Ornop telah memberi sumbangan pada sistem politik Indonesia. Sistem politik yang semula dominan dengan peran partai politik, parlemen, militer dan ideologi tradisional; kini menemukan realitas baru dengan hadirnya organisasi masyarakat sipil atau Ornop. Ornop berperan cukup signifikan dalam formasi sosial politik Orde Baru dan, dengan berbagai kelemahan yang melekat padanya, Ornop telah menemukan idiom baru yang relevan dan penting untuk memahami dunia dan paradigma baru yang akan dihadapi umat manusia abad 21 mendatang; masa semua rezim kuno dan usang yang bersifat menindas tinggal menjadi fosil sejarah memalukan dan diganti oleh datangnya fajar peradaban kemanusiaan yang lebih baik. ●

